

Golkar Berjanji Upayakan Batas Parlemen 5 Persen

Multipartai dinilai tak cocok dengan penguatan sistem presidensial.

JAKARTA — Partai Golongan Karya menyatakan tetap mendorong penyederhanaan jumlah partai politik. “Penetapan *parliamentary threshold* sebesar 5 persen merupakan kebutuhan bersama. Hal itu mutlak diperlukan,” kata Ketua Golkar Bidang Politik, Aulia Rahman, membacakan pernyataan politik di kantor pusat Golkar di Jakarta kemarin.

Pernyataan itu hasil rapat pimpinan nasional yang diadakan di Jakarta pada 26-28 Oktober lalu. *Parliamentary threshold* adalah syarat perolehan suara dalam pemilihan umum bagi partai untuk bisa masuk ke parlemen.

Aulia menjelaskan, perubahan sistem politik menyisakan berbagai permasalahan, misalnya sistem pemerintahan presidensial dengan sistem multipartai. Padahal penerapan sistem multipartai tak cocok dengan penguatan sistem presidensial. Multipartai mengarah pada praktek sistem pemerintahan parlementer.

Ketua Umum Aburizal Bakrie menyatakan jumlah partai yang ideal di Dewan Perwakilan Rakyat adalah lima-enam partai. “Golkar memperjuangkan (*parliamentary threshold*) 5 persen sehingga dapat terjadi lima-enam partai di dalam



Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie dalam acara pernyataan politik di kantor pusat Golkar kemarin.

parlemen,” ujarnya.

Pembacaan 10 poin pernyataan politik itu dihadiri juga oleh Sekretaris Jenderal Idrus Marham, Wakil Ketua Umum Sharif Cicip Sutardjo, Wakil Ketua Umum Theo L. Sambuaga, Wakil Ketua Umum Fadel Muhammad, dan Bendahara Umum Setya Novanto. Pernyataan ini meliputi berbagai hal, dari penyederhanaan partai, impor pangan, perbatasan, keamanan di Pa-

pua, hingga kasus Bank Century.

Golkar dan PDI Perjuangan mengusulkan angka 5 persen dalam pembahasan revisi Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum di DPR. Partai Demokrat dan pemerintah menginginkan 4 persen. Adapun enam partai lain di DPR menginginkan maksimal 3 persen, yakni PPP, PKB, PKS, PAN, Partai Hanura, dan Partai Gerindra.

Menurut Direktur Eksekutif

Centre for Electoral Reform Hadar Navis Gumay, akan ada enam partai di DPR jika batas parlemen 5 persen. Jika mengacu pada hasil Pemilu 2009, enam partai itu adalah Demokrat (dengan kursi 30,89 persen), Golkar (21,96 persen), PDI Perjuangan (19,64 persen), PKS (11,61 persen), PAN (8,57 persen), dan PPP (7,32 persen). Sedangkan PKB, Hanura, dan Gerindra terlempar. ● MAHARDIKA SH | JOBPPI S

Politik Dinasti Akan Diputus

JAKARTA — Pemerintah menyatakan berkomitmen menghapus politik dinasti dalam pemerintahan di daerah dengan mengubah sejumlah aturan dalam Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah yang memungkinkan praktek itu.

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menerangkan, draf revisi undang-undang itu tegas melarang keluarga inti kepala daerah yang sedang berkuasa mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah. Aturan ini tak hanya berlaku untuk pengganti kepala daerah tersebut, tapi juga untuk daerah sekitarnya. “Konsep kami, harus ada jeda minimal lima tahun,” katanya di Jakarta kemarin.

Menurut Gamawan, pembatasan ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan yang sama kepada seluruh warga negara menduduki posisi kepala daerah. Pemerintah baru juga tak bisa melindungi kepala daerah lama jika terjadi kasus hukum kelak di kemudian hari.

Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah sudah diserahkan oleh Kementerian Dalam Negeri kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Rencananya, rancangan segera diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat agar bisa dibahas dan disahkan pada tahun depan. “Saat ini sudah di meja Presiden, menunggu disetujui.”

Politik dinasti terjadi di sejumlah daerah karena belum ada aturan yang ketat. Beberapa waktu lalu publik mempersoalkan para pejabat daerah, antara lain di Provinsi Banten, yang masih kerabat Gubernur Ratu Atut Chosiyah. Contoh lainnya, Bupati Kediri dijabat oleh istri bupati sebelumnya.

Gamawan menjelaskan, bakal diatur secara terperinci siapa saja keluarga inti kepala daerah yang dilarang mencalonkan diri. Sejauh ini baru disepakati larangan untuk suami atau istri dan anak. Rancangan itu juga mengatur bahwa kepala daerah yang menjabat dua periode tak bisa mencalonkan lagi sebagai wakil kepala daerah. ● IRA GUSLINA

Polisi Tuduh Kelompok Abu Omar Incar Polisi

JAKARTA — Juru bicara Markas Besar Kepolisian RI, Brigadir Jenderal M. Taufik, mengklaim kelompok tersangka teroris pimpinan Abu Omar berencana menyerang polisi. “Sejauh ini terungkap, senjata yang mereka miliki akan digunakan menyerang pos-pos polisi,” katanya kemarin.

Ia menjelaskan, belum ada data lengkap pos-pos polisi mana saja yang diincar. Detasemen Khusus 88 Antiteror masih memeriksa tiga

anak buah Omar, termasuk mengenai siapa pembeli senjata dan kemungkinan jaringan masuk ke lingkungan kampus Universitas Indonesia, Depok.

Taufik pun menyebut jaringan Abu Omar yang memasok senjata ke kelompok lainnya. “Senjata itu dari Mindanao (Filipina).” Namun ia tak mengungkapkan jaringan teroris mana saja yang terkait dengan kelompok Abu Omar. Abu Omar dicokok polisi sekitar tiga

bulan lalu di Balikpapan, Kalimantan Timur.

Sabtu pagi pekan lalu, Densus 88 menangkap DAP, 34 tahun, BH alias D (35), dan A (32) di Cipondoh dan Karawaci. A ditembak pada kakinya karena membawa senapan M-16 ketika akan dicokok. Ketiganya kini berstatus tersangka. Mereka diduga buron kasus peledakan bom Cirebon dan jaringan Abu Omar. Malam itu juga polisi mencari barang bukti

senjata api di sekitar danau kampus UI.

Kriminolog dari UI, Adrianus Meliala, menduga ada peran orang dalam universitas sehingga kampus menjadi tempat latihan dan penyimpanan senjata api. “Jangan-jangan ada kaitannya dengan informasi yang diberikan oleh mahasiswa UI,” ucapnya di Markas Komando Brimob, Kelapa Dua, Depok, kemarin.

● ISMA S | FRANCISCO R

INTEGRATED NETWORK SOLUTIONS

CALL US
(021) 831 03 01
email : inquiry@i4te.com
www.i4te.com

DEDICATED INTERNET
VLAN
WIRELESS & FIBER OPTIC
MICRO SITE
HOSTING